

Kaum Awam dan Politik: Memahami Partisipasi dalam Doktrin Kongregasi Ajaran Iman

Marsela Sadaria Duha^{a, 1*}, Margaretha Jayusni Siribere^{a, 2}, Klemen^{a, 3}, Yuliana Eni Yuliati^{a, 4}

^a Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Indonesia

¹ marseladuha19@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel :

Received: 25 Desember 2023;

Revised: 6 Januari 2024;

Accepted: 16 Januari 2024.

Kata-kata kunci:

Kaum Awam;

Politik;

Partisipasi;

Doktrin;

Kongregasi Ajaran Iman.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendalami hubungan kompleks antara kaum awam, dan ajaran iman, dan fokus pada doktrin kongregasi ajaran iman. Peran dan kontribusi kaum awam dalam konteks politik yang diajarkan dalam kongregasi ajaran iman. Termasuk memeriksa komponen politik yang mungkin terlibat dalam operasi dan struktur gereja. Dokumen "Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik" dari Kongregasi untuk Ajaran Iman, diterbitkan pada 24 November 2002, membahas kompleksitas hubungan antara agama dan politik, terutama dalam konteks Gereja Katolik. Dokumen ini menekankan perlunya pedoman moral dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam adaptasi umat Katolik terhadap perubahan global. Fokusnya adalah pada peran kaum awam sebagai pembawa nilai-nilai agama ke dalam politik, menekankan partisipasi aktif dan komitmen terhadap keadilan. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif studi pustaka, merinci pandangan Gereja tentang politik sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan melindungi martabat manusia. Kesimpulannya menyoroti panggilan kaum awam untuk menjadi nabi-nabi baru dalam politik modern, menyuarakan harapan dan nilai-nilai agama dengan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

ABSTRACT

Laity and Politics: Understanding Participation in the Doctrine of the Congregation for the Doctrine of the Faith. The purpose of this study is to explore the complex relationship between the laity, and the doctrine of the faith, and focus on the doctrine of the congregation of the doctrine of the faith. The role and contribution of the laity in the political context taught in the congregation of the doctrine of the faith. This includes examining political components that may be involved in church operations and structure The document "The Participation of Catholics in Political Life" of the Congregation for the Doctrine of the Faith, published on November 24, 2002, discusses the complexity of the relationship between religion and politics, especially in the context of the Catholic Church. This document emphasizes the need for moral guidance in facing the challenges of the times, especially in the adaptation of Catholics to global changes. The focus is on the role of the laity as carriers of religious values into politics, emphasizing active participation and commitment to justice. This research, using the qualitative method of literature study, details the Church's view of politics as a means to realize justice and protect human dignity. The conclusion highlights the call of the laity to be the new prophets in modern politics, voicing religious hopes and values by actively participating in the democratic process.

Copyright © 2024 (Marsela Sadaria Duha, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Duha, M. S., Siribere, M. J., Klemen, K., & Yuliati, Y. E. (2024). Kaum Awam dan Politik: Memahami Partisipasi dalam Doktrin Kongregasi Ajaran Iman. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(3), 76–83. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i3.1975>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dokumen "Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik" dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman di Roma, 24 November 2002, sebagai respons terhadap dinamika kompleks antara agama dan politik, khususnya di lingkungan Gereja Katolik. Latar belakangnya terkait dengan tuntutan zaman dan kebutuhan akan panduan moral dalam konteks kehidupan politik. Dokumen ini muncul di tengah kekhawatiran akan etika dalam politik. Dengan berkembangnya kompleksitas isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, Gereja Katolik merasa perlu memberikan pedoman etika yang jelas bagi umatnya yang terlibat dalam kehidupan politik. Jadi politik pada hakikatnya menawarkan berbagai pemilihan kebijakan untuk mengurus negara dan hal-hal yang berkaitan dengannya (Simamora, 2018).

Perubahan dalam masyarakat dan kemajuan teknologi membawa tantangan-tantangan baru yang memerlukan respons moral. Dokumen ini mencoba menyajikan pandangan Gereja mengenai cara umat Katolik dapat bersikap dan berperan di dalam dunia politik yang terus berubah. Dalam konteks globalisasi, interkoneksi antarnegara dan keberagaman masyarakat menuntut pandangan yang holistik terhadap peran umat Katolik. Juga sebagai panduan untuk beradaptasi dengan tantangan global dan menjaga prinsip-prinsip moral dalam interaksi politik global. Masyarakat Indonesia merupakan objek yang paling untuk diteliti selain mempunyai sosial yang tinggi karakter masyarakat yang terbelang untuk serta ditambahkan budaya yang beraneka ragam (Budiman & Setyahadi, 2019).

Peran Gereja dalam kehidupan politik telah menjadi isu penting dalam sejarah. Dokumen ini mungkin muncul sebagai respons terhadap evolusi hubungan antara Gereja Katolik dan negara-negara di berbagai bagian dunia, menggarisbawahi kemandirian dan peran moral Gereja dalam menyuarakan keadilan. Dokumen ini sebagai dorongan untuk meningkatkan partisipasi aktif umat Katolik dalam proses politik. Dalam era di mana partisipasi publik dapat membentuk kebijakan, Gereja mungkin merasa perlu untuk memberdayakan umatnya agar dapat berperan secara efektif dalam membentuk masyarakat yang adil. Gereja bukan hanya sekedar lembaga ritual keagamaan melainkan alat dihadirkan Tuhan dalam dunia untuk kesaksian Injil. Karena itu gereja di panggil untuk melakukan transformasi nilai-nilai yang baik (Ngelow, 2014)

Kaum awam adalah orang-orang Kristiani yang tidak termasuk dalam kelompok religius atau tertahbis. Mereka tergabung dalam tubuh Kristus secara khusus dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara pernyataan Tuhan dan bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan sebagai Juruselamatnya, sehingga Injil dapat dibagikan ke seluruh dunia. Kaum awam memiliki peran yang sangat jelas dalam pekerjaan Gereja saat ini. Orang biasa melakukan tugas yang diberikan kepada Kristus sejak dia dibaptiskan, yaitu menjadi Nabi, Imam, dan Raja. Nabi masa kini memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan harapan kepada orang-orang, terutama saat kita menghadapi kesulitan dan bencana. Mereka dapat memberikan dukungan spiritual dan menekankan bahwa iman dan ketaatan kepada Tuhan memiliki harapan. Fakta bahwa Allah yang mahakudus memanggil manusia untuk menjadi kudus, atau hidup bersatu dengan Dia, adalah dasar dari kekudusan kaum awam. Sebagai raja, Kristus mengajar, memerintah, melindungi, dan menyelamatkan orang, (Marbun et al., 2022).

Kaum awam merupakan kelompok masyarakat umum yang tidak memiliki peran formal dalam struktur keagamaan atau politik. Kaum awam memiliki peran yang signifikan dalam memahami dan merespon dinamika politik. Politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk nilai-nilai budaya sosial dan agama yang mereka anut. Kaum awam seringkali membawa nilai-nilai budaya dan sosial dari lingkungan mereka ke dalam arena politik yang mencakup norma-norma sosial, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemahaman politik kaum awam sering dipengaruhi oleh bagaimana nilai-nilai berinteraksi dengan isu-isu politik kontemporer. Ditinjau dari tingkat pendidikan politik kaum awam juga memaknai peran penting dalam pendidikan politik dapat membentuk kesadaran politik mereka membantu mereka memahami sistem politik dan memberikan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Partisipasi dalam politik dalam

konteks doktrin Kongregasi Ajaran Iman melibatkan peran dan tindakan kaum awam yang terinspirasi dan dipandu oleh ajaran-ajaran agama yang dipegang teguh oleh kongregasi tersebut.

kata "politok" itu sendiri bersal dari kebudayaan Yunani. berasal dari kata "polis": Plato menggunakan kata "Politeia" ketika dia mendeklarasikan suatu negara, dan kemudian Aristoteles menggunakan kata "Politon" (Politik) sebagai judul bukunya yang membahas negara. "Polis" sendiri merujuk pada negara kota. Memang, orang-orang Yunani kuno tinggal bersama mereka dalam suatu kota, atau polis. Oleh karena itu, politik didefinisikan sebagai seni untuk menjalin hubungan dengan polisi (sekarang dianggap negara).

Politik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu negara atau masyarakat untuk membuat dan menerapkan kebijakan. Ini termasuk pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan, perwakilan, dan interaksi antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Politik sering kali berkaitan dengan pembagian kekuasaan, pembagian sumber daya, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Studi politik mencakup analisis struktur politik, dinamika kekuasaan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Partisipasi adalah istilah yang mengacu pada keterlibatan atau kontribusi seseorang atau kelompok dalam suatu aktivitas, proses, atau kegiatan tertentu. Ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, atau budaya. Tingkat keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu situasi atau kejadian menunjukkan partisipasinya. Partisipasi Gereja katolik dalam reformasi kehidupan politik, secara khusus merupakan suatu persoalan yang sering diperdebatkan oleh pihak untuk mencari solusi kehidupan berbangsa dan bernegara (Marius Omyair). Dalam masyarakat yang penuh dengan dinamika politik dan berbagai kegeragaman agama, kaum awam memegang peranan kristual dalam memebntuk dan menggerakan roda politik.

Partisipasi merukan dalam proses politik dapat dipengaruhi oleh faktor, termasuk keyakinan keagamaan yang mereka anatu. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk mendalami hubungan yang kompleks antara kaum awam, politik, dan ajaran iman, dengan fokus pada doktrin kongregasi ajaran iman. Dalam sejarah manusia, peran agama sering kali menjadi elemen penting dalam membentuk norma-norma sosial dan nilai-nilai masyrakat. Kaum awam, yang merukan anggota umum masyarakat dan tokoh-tokoh keagamaan yang meiliki peran formal, sering kali menjadi perwakilan utam nilai-nilai keagamaan dalam konteks politik. Doktrin kongregasi ajaran iman, sebagai bagaian integral dari warisan keagamaan, memiliki dampak signifikasi pada pandangan dunia dan tindakan kaum awam, membentuk keseimbangan antara kehidupan rohani dan dunia meterial.

Gereja Katolik menganjurkan umat awam untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan politik partisan. Ini adalah komitmen kenabian dan misioner mereka untuk mempraktekan iman mereka. Sebagaimana kita ketahui, Gereja memiliki prinsip "Semper Reformansa" (senantiasa berubah). Prinsip ini hendak menegaskan bahwa Gereja senantiasa berubah mengikuti arus zaman (Yekrianus, 2022). Selain itu, alasan mereka untuk berpartisipasi dalam politik partisan tidak harus berasal dari agama; sebaliknya, itu harus terutama bertujuan untuk kepentingan umum, atau bonum commune, kebaikan umum, bagi setiap warga negara dari negara mereka, tanpa memandang suku, agama, daerah, atau ras. Menurut pemahaman Paulus, gereja digambarkan sebagai umat Allah, tubuh Krisrus dan bait Roh Kudus (Junior Natan Silalahi, 2021).

Partisipasi Gereja Katolik dalam reformasi kehidupan politik adalah suatu masalah yang sering dibahas oleh berbagai pihak, terutama dalam upaya untuk menemukan solusi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang manusiawi. Ini mengingatkan bahwa Keterlibatan Sosial Gereja menyatakan bahwa kehidupan bernegara adalah tempat untuk kesejahteraan bersama dan hak asasi manusia,(Omyair, 2022).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan inikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi, (Primandh). Perekmbangan politik dan partisipasi kaum awam bukanlah

fenomena baru. Dalam setiap tatanan masyarakat, kaum awam membawa beban tanggung jawab untuk memberikan suara mereka dalam proses politik, baik melalaui umum, aksi sosial, atau melalaui pengaruh mereka dalam bentuk kebijakan. Namun, bagaimana doktrin kongregasi iman berinteraksi dengan kehidupan politik kaum awam menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara doktrin kongregasi iman, kaum awam, dan partisipasi politik. Dengan mengali faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan tindakan politik kaum awam yang berakar pada kepercayaan keagamaan, ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur terkait dan memberikan wawasan baru dalam konteks hubungan antara keagamaan dan politik.

Menurut Mariam Budiardjo partisipasi politis suatu kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta atau berperan secara aktif dalam bidang politik (Fitzher). Dalam hal ini, partisipasi politik menjadi wujud konkret dari penghayatan dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari. Partisipasi politik dalam doktrin Kongregasi Ajaran Iman didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran agama yang dijunjung tinggi. Kaum awam dipandu oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang diambil dari ajaran agama, dan mereka berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan politik mereka. Partisipasi politik dalam konteks ini mencakup dukungan terhadap kebijakan dan tindakan politik yang sejalan dengan ajaran-ajaran agama. Kaum awam yang terlibat dalam aktivitas politik berupaya mempromosikan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, perdamaian, dan kesetaraan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

Kaum awam yang memahami doktrin Kongregasi Ajaran Iman dapat berperan sebagai pengaruh moral dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka dapat membawa perspektif keagamaan mereka ke dalam forum-forum politik, berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan (Gultom, 2023). Kaum awam yang menganut doktrin Kongregasi Ajaran Iman dapat terlibat dalam gerakan sosial yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama mereka. Hal ini mencakup partisipasi dalam kegiatan amal, advokasi untuk hak asasi manusia, atau mendukung isu-isu sosial yang dianggap penting dalam kerangka keagamaan. Partisipasi dalam politik juga dapat mencakup dimensi doa dan kebaktian. Kaum awam dapat aktif berdoa untuk kesejahteraan pemimpin politik, stabilitas negara, dan penyelesaian damai terhadap konflik politik. Kebaktian juga dapat menjadi sarana ekspresi spiritual terhadap situasi politik yang dihadapi. Dengan demikian, partisipasi politik dalam doktrin Kongregasi Ajaran Iman bukan hanya sebatas aksi politik, tetapi juga merupakan ekspresi konkret dari penghayatan ajaran agama dalam konteks sosial dan politik. Hal ini membentuk keterlibatan kaum awam dalam membawa nilai-nilai keagamaan ke dalam arena politik untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan dan keadilan.

Tujuan penelitian ini untuk mendalami hubungan yang kompleks antara kaum awam, politik, dan ajaran iman, dengan fokus pada doktrin kongregasi ajaran iman. peran dan kontribusi kaum awam dalam konteks politik yang diajarkan dalam kongregasi ajaran iman. termasuk memeriksa komponen politik yang mungkin terlibat dalam operasi dan struktur gereja. Ini dapat mencakup pemeriksaan kebijakan internal, proses pengambilan keputusan, dan bagaimana kekuasaan dibagi antara anggota kongregasi dan pemimpin gereja.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi pustaka. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan studi yang fokus pada eksplorasi dan pemahaman kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks dan signifikansi fenomena yang diteliti, dengan lebih menekankan pada aspek deskriptif dan interpretatif daripada pengukuran kuantitatif.

Hasil dan Pembahasan

Kaum Awam dan Politik: Memahami Partisipasi dalam Doktrin Kongregasi Ajaran Iman" menunjukkan bahwa fokus utama dari kajian ini adalah hubungan antara kaum awam (umumnya masyarakat awam atau non-klir) dengan politik, dengan penekanan pada partisipasi mereka dalam kerangka doktrin atau ajaran iman yang terkait dengan kongregasi atau kelompok keagamaan tertentu. Kaum awam yang terlibat dalam doktrin kongregasi memiliki tujuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan gerejawi. Ini bisa termasuk terlibat dalam kegiatan pengembangan kebijakan, pemilihan pemimpin gereja, dan berpartisipasi dalam rapat-rapat gerejawi dan memperjuangkan nilai-nilai moral dalam kebijakan publik atau berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas. Bagi gereja, politik lahir dari dan bertujuan untuk membela dan menegakkan keadilan bagi semua orang dan perlindungan martaba dari setiap pribadi imanusia (Alexander Jebadu). Politik juga memiliki otonomi. Karena itu para politisi katolik tidak bertindak atas nama gereja, baik umat maupun Hirarki (Dhedhu, 2021).

Kaum awam Merujuk kepada masyarakat umum, non-klir, atau individu yang tidak terlibat secara langsung dalam hirarki keagamaan. Politik Menyatakan keterlibatan dalam proses politik atau aktivitas politik, termasuk partisipasi dalam pemilihan, advokasi, atau kegiatan politik lainnya. partisipasi politik Menekankan aspek pemahaman, pengetahuan, atau persepsi yang dimiliki oleh kaum awam terkait dengan politik dan doktrin keagamaan. Partisipasi Mengacu pada keterlibatan aktif atau kontribusi dari kaum awam dalam kegiatan politik atau kehidupan keagamaan, baik dalam konteks kongregasi atau di tingkat yang lebih luas. Kaum awam juga memiliki peran sebagai dasar pemilihan dalam proses demokrasi. Mereka dapat memilih perwakilan dalam pemilihan umum dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk proses politik lainnya. Kaum awam dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan melalui keterlibatan dalam forum, pertemuan masyarakat, atau dialog bersama pemerintah. Ini dapat mencakup memberikan masukan, menyuarakan kekhawatiran, dan memengaruhi kebijakan publik. Politik merupakan sebuah usaha yang terarah pada kesejahteraan seluh masyarakat (Wicaksana, 2014). Mereka yang terlibat dalam politik apapun memiliki peraan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Doktrin yang di keluarkan oleh Kongregasi ajaran iman mengatakan, umat Katolik dapat berpartisipasi dalam banyak partai politik, terutama di dewan legislatif, untuk memanfaatkan hak dan kewajiban mereka untuk berkontribusi pada kehidupan publik negara mereka. Ini disebabkan oleh kontingensi dari pilihan tertentu tentang tatanan masyarakat, beragamnya metode yang tersedia untuk mencapai atau menjamin nilai fundamental yang sama, kemungkinan interpretasi yang berbeda dari prinsip-prinsip dasar teori politik, dan kompleksitas teknis dari banyak teori politik. Namun, hal ini tidak boleh disamakan dengan pluralisme yang ambigu dalam menentukan nilai-nilai penting atau prinsip moral. Berhubungan langsung dengan ajaran moral dan sosial Kristiani, pluralitas pilihan temporal yang sah merupakan cikal bakal komitmen umat Katolik terhadap politik. Berdasarkan ajaran ini, orang awam Katolik harus menilai keterlibatan mereka dalam kehidupan politik untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka ditandai dengan tanggung jawab yang jelas terhadap dunia.

Menurut McClosky berpendapat, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang mengambil bagian dalam proses pemilihan secara langsung dan tidak langsung untuk mengambil kebijakan (Abraham Nurcahyo). Artinya dalam mengambil bagian dalam bidang politik kaum awam dapat berpartisipasi dengan suka rela tanpa adanya imbalan dalam mengambil bagian dalam politik tersebut.

Menurut Mariam Budiardjo (2008: 367), bahwa partisipasi politik kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara yang baik baik secara langsung dan tidak langsung untuk kebijakan. Dari penjelasan tersebut di atas, bahwa dalam bidang politik kaum awam berperan sebagai warga masyarakat yang suka rela dalam

mengambil bagian politis untuk kebijakan negara. Sehingga kaum awam dapat terlibat di bidang politik (Dwira Kharisma²)

Iman dalam tradisi Kristen sering kali diartikan sebagai kepercayaan yang mendalam pada Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan kepercayaan pada ajaran-ajaran Alkitab. Iman juga berdampak pada bidang sosial politik melalui tindakan tanggung jawab dan dari para anggota gereja. Paus Yohanes II dengan tegasnya menyatakan bahwa Gereja boleh ikut campur tangan di dalam bidang politik dan harus menghormati otonomi bidang duniawi. Hal ini gereja sangat berharap kepada kaum awam dan anak-anak muda, agar mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di duniawi. Salah satunya terlibat dalam politik (Dismas Kwirinus).

Dokumen Puebla No.615 politik dipahami dalam konteks ketuhanan Yesus Kristus. Hal ini politik berhubungan dengan kerja Allah artinya dalam politik adanya keterlibatan Tuhan, agar adanya keadilan dan kesejahteraan dunia. Hubungan antara agama dan politik

(Alexander Jebadu). Hubungan antara politik dan agama dapat sangat kompleks dan bervariasi di seluruh dunia tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan sistem politik yang berlaku. Menurut Paul Radin (1957) mendefinisikan agama sebagai kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan adikodrati dan ritual yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut.

Menurut Tremmel agama adalah cara-cara manusia berperilaku dalam usaha menghadapi aspek-aspek kehidupan manusia yang menakutkan. Dari penjelasan di atas agama merupakan suatu ritual dan menakutkan hal ini dapat menimbulkan suatu cara orang-orang untuk menanggapi berbagai hal. Pada hal agama adalah suatu identitas. Hal ini dalam dunia politik terkadang para politikus mengambil kesempatan untuk berkunjung di agama-agama lain, agar kaum muda dapat memilih mereka sebagai pemimpin negara. Menurut Adolf Heuken (1994:21) dan Eddy Kristianto (2008: 2) berpendapat bahwa politik merupakan seni mengelola, mengurus, dan merawat negara dan pemerintahan dalam kaitannya tanggung jawab untuk melayani rakyat (Rohani et al., 2015)

Menurut Haviland mengatakan agama adalah kepercayaan dan pola tingkah laku, yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi berbagai masalah (Amri Marzali). Agama sering kali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik, terutama dalam masyarakat di mana nilai-nilai keagamaan berperan penting. Partai politik dan kebijakan pemerintah dapat tercermin dari ajaran dan norma-norma agama tertentu. Sebaliknya, politik juga dapat memengaruhi praktik keagamaan. Kebijakan publik dan hukum dapat mempengaruhi kebebasan beragama, pembangunan tempat ibadah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Partisipasi pemimpin keagamaan sering terlibat secara aktif dalam urusan politik. Mereka dapat memberikan pandangan moral, mendukung kandidat tertentu, atau bahkan menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Hubungan pemimpin keagamaan dengan pemerintah tidak selalu harmonis; kadang-kadang, terjadi konflik karena perbedaan pandangan atau tujuan antara kekuasaan politik dan otoritas agama.

Menurut Konsili, ciri khas dan tugas khusus kaum awam dalam kehidupan gereja adalah tugas di tengah dunia, meresapi beresapi berbagai bidang urusan duniawi dengan semangat Kristus (Jegalus, 2020). Panggilan kaum awam, terutama mereka yang bekerja di bidang politik dan sosial kemasyarakatan, untuk menyebarkan semangat Injil ke seluruh dunia membutuhkan pembekalan dengan iman seperti itu untuk menjadi nabi-nabi baru di era dewasa ini. Kitab Suci adalah sumber utama spiritualitas karena mengisahkan tentang sembilan nabi, termasuk Yesus sendiri, yang berbicara tentang kenabian mereka dalam konteks sosial dan politik masa itu. Sangat penting untuk membuat orang awam sadar akan tanggung jawab sosial kemasyarakatan dan politik. Hal ini perlu dilakukan bukan karena kebutuhan akan cinta tanah air atau tantangan disintegrasi bangsa yang dewasa ini, tetapi karena iman Kristiani yang mendalam. "Kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia" (Matius 5:13-14). Bangsa ini berada di tengah-tengah nadir. Hampir semua ini mengalami penurunan. Korupsi, kolusi, pemujaaan uang, kuasa, materi, ingin menang sendiri, pemaksaan kehendak, main hakim sendiri, dan berbagai penyakit parah telah masuk ke dalam tubuh manusia dengan sangat dalam.

Simpulan

Politik sebagai sarana mewujudkan keadilan dan martabat manusia: politik, menurut pemahaman dalam doktrin, lahir dari dan bertujuan untuk membela dan menegakkan keadilan bagi semua orang dan melindungi martabat setiap individu manusia. Ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral Kristiani dalam konteks politik. Kaum awam memiliki peran penting dalam politik sebagai warga masyarakat yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum, berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, memberikan masukan, dan memengaruhi kebijakan publik. Mereka juga diakui sebagai dasar pemilihan dalam proses demokrasi. Dokumen dari Kongregasi Ajaran Iman menyatakan bahwa umat Katolik dapat berpartisipasi dalam berbagai partai politik dengan mempertimbangkan nilai-nilai fundamental yang sama. Namun, pluralitas ini tidak boleh disamakan dengan ketidakjelasan dalam menentukan nilai-nilai penting atau prinsip moral. Partisipasi dalam politik adalah kegiatan sukarela warga masyarakat dalam proses pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membentuk kebijakan. Kaum awam dapat berpartisipasi tanpa imbalan materi, mencerminkan komitmen dan tanggung jawab sosial. Kaum awam, terutama mereka yang terlibat dalam bidang politik dan sosial, dipanggil untuk menyebarkan semangat Injil di seluruh dunia. Mereka diharapkan membawa nilai-nilai iman mereka ke dalam realitas sosial dan politik, mengingatkan akan tanggung jawab sosial kemasyarakatan dan politik yang mereka miliki sebagai bagian dari iman Kristiani.

Referensi

- Adlini, M. N., Anisya, H. D., Sarah, Y., Octavia, C., & Sauda, J. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*.
- Gultom, A. (2023). *Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen*. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://ejournal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 447-453.
- Habsy, B. A. (2017). *Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling*. JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa, 1(2), 90.
- Marbun, R., Manete, D., & ... (2022). Kaum Awam Sebagai Pelayan Tuhan dan Implikasinya Bagi Pelayanan Gereja di Pedesaan. ...: Jurnal Teologi Dan ..., 1(November), 23–43. <https://resources.stinti.ac.id/ojs/index.php/JT/article/view/14%0Ahttps://resources.stinti.ac.id/ojs/index.php/JT/article/download/14/5>
- Omyair, M. (2022). Partisipasi Gereja Katolik Dalam Reformasi Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Logos*, 2(April), 49–58.
- Budiman, S. A., & Setyahadi, M. M. (2019). Peran Ormas Islam dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019 (Kajian Pustaka pada Organisasi Islam Terbesar NU dan Muhammadiyah). *Jurnal Renaissance*, 4(02), 560–563.
- Dhedhu, F. (2021). Peran Hirarki Gereja Dalam Meningkatkan Peran Sosial-Politik Para Politisi Katolik Sebagai Bentuk Perwujudan Iman. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.53949/ar.v2i2.50>
- Jegalus, N. (2020). Tanggung Jawab Awam Dalam Perutusan Diaconia Gereja. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 10(2), 139–164. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i2.475>
- Junior Natan Silalahi. (2021). Gereja yang Sehat Gereja dan Entrepreneurship: Peran Gereja dalam Ketahanan Ekonomi Jemaat pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional STT Sumatera Utara*, 1(Vol. 1, No.1, 2021), 22–29.
- Ngelow, Z. J. (2014). Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama - Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia. *Jurnal Jaffray*, 12(2), 213–234. <https://doi.org/10.25278/jj.v12i2.016.213-234>

- Rohani, P., Terhadap, K., Bosco, D., & Ardijanto, K. (2015). Lembaga Penelitian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan “Widya Yuwana” Madiun. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 13(April).
- Simamora, A. B. (2018). Politik Menurut Alkitab Dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik Di Indonesia. *Jvow Vol 2 No 1*, 2(1).
- Wicaksana, P. H. (2014). Keterlibatan Kuam Awam Katolik Dalam Bidang Politik Studi Kasus di Desa Banjarsari pada Tahun 2012-2013. *Jurnal Teologi*, 3(1), 37–49. <https://doi.org/10.24071/jt.v3i1.450>
- Yekrianus, S. (2022). Panggilan dan Perutusan Kaum Awam Katolik Dalam Membangun Gereja di Tengah Merebaknya Disrupsi Digital. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 18(2), 107–123.